
**KOMITMEN KEBANGSAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM MENGUATKAN KETAHANAN POLITIK DI INDONESIA**Inggar Saputra¹¹Fakultas Hukum Universitas Jakarta**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan komitmen kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menguatkan ketahanan politik di Indonesia. Paska pemilihan umum presiden tahun 2019 menghasilkan polarisasi politik yang luar biasa di masyarakat yang melibatkan sentimen keagamaan dan kebangsaan. Kondisi polarisasi politik akibat adanya tentara siber yang dibentuk relawan dan konsultan politik menghasilkan kekacauan sosial, pembelahan sosial dan konflik antar kelompok di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur yang berhubungan dengan subjek yang akan diteliti. Dalam merespons ketegangan politik paska Pilpres 2019, adanya komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat efektif menekan konflik yang ada. Komitmen kebangsaan MUI berisikan lima pikiran pokok. (1) Penegasan eksistensi NKRI tidak terlepas dari perjuangan umat Islam (2) Kewajiban umat Islam menjaga keutuhan dan kebersamaan antar elemen bangsa (3) Bentuk NKRI berdasarkan Pancasila bersifat mengikat seluruh elemen kebangsaan (4) Setiap elemen bangsa harus hidup berdampingan dengan prinsip kesepakatan bukan permusuhan (5) Mengingat penyelenggara negara terhadap tujuan nasional dari bangsa Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah ketegangan politik di media sosial akibat ketidakdewasaan berpolitik harus dihentikan dan sesama bangsa Indonesia serta umat beragama, kita harus mengedepankan prinsip kedamaian, keharmonian, serta mengedepankan tujuan dan kepentingan nasional bangsa Indonesia di atas kepentingan politik. Dengan adanya sikap dan komitmen kebangsaan MUI maka kita harus membiasakan mencari titik kesepakatan sehingga tercapai konsensus yang mampu menghentikan dinamika dan konflik yang ada agar tidak semakin berkepanjangan dan mengganggu keutuhan bangsa dan negara.

Pendahuluan

Persoalan kebangsaan dan keumatan di Indonesia sejatinya adalah sebuah kesatuan yang menyeluruh. Indonesia adalah negara mayoritas umat Islam, sehingga kelompok Islam sejak dulu ikut aktif berperan dalam merebut dan menjaga kemerdekaan Indonesia. Masa pra kemerdekaan segala upaya dakwah para ulama dan pejuang dakwah Islam baik melalui pendidikan, ekonomi dan kultural sosial-budaya dilandasi semangat anti penjajahan dan keinginan melawan kolonialisme menuju jembatan emas kemerdekaan. Dengan berpedoman kepada Pancasila sebagai basis ideologi, nilai universal dan kepribadian bangsa, maka umat Islam selalu berupaya di garis terdepan dalam menguatkan komitmen kebangsaan dengan menjaga, merawat dan mengawal secara kritis-konstruktif pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Dalam berbagai pergerakan zaman, umat Islam hadir

memberikan warna dalam sosial, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan agar senantiasa selaras dan tidak bertentangan dengan nilai Islam.

Hubungan negara dan agama khususnya umat Islam di Indonesia seringkali mengalami pasang surut seiring dinamika politik di tanah air. Negara yang identik dengan Pancasila seringkali dihadapkan dengan aspirasi dan kepentingan agama khususnya umat Islam yang mayoritas dianut penduduk Indonesia sebagai sesuatu yang dianggap berbeda. Masa awal kemerdekaan umat Islam, upaya mendamaikan kalangan Islamis, sekuler dan komunisme melalui konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) dari Soekarno dibenturkan sehingga memicu konflik berkepanjangan baik secara intelektual dan fisik. Paska itu di masa Orde Baru, Pancasila kembali dianggap sebagai “lawan” umat Islam dengan kekisruhan asas tunggal Pancasila dan perampangan partai politik. Paska reformasi, Pancasila kembali mengalami benturan dengan adanya beragam aksi kelompok fundamentalis yang menyebarkan paham radikalisme dan terorisme melalui cara kekerasan yang meninggalkan korban nyawa dan kerugian fisik. Dalam merespons itu semua, jelas dibutuhkan kesepakatan dan keyakinan kolektif untuk menegaskan bahwa Pancasila dan umat Islam sejatinya sebuah kesatuan yang tidak selayaknya dipertentangkan.

Selain Pancasila, wawasan kebangsaan umat Islam mengalami pembentukan yang panjang dengan berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita lahir, tumbuh dan besar dalam lingkungan pergaulan di Indonesia yang berbeda dari suku, agama, ras dan antar golongan. Tetapi kita disatukan fakta bahwa semua itu potensi dan kekayaan lahir-batin yang mendorong kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia sehingga mampu membentuk kepribadian sebagai bangsa Indonesia yang satu. Perbedaan dijadikan sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar dalam pergaulan antar sesama bangsa Indonesia dan dunia internasional. Adanya perbedaan bisa membuat seseorang belajar untuk mencapai cita-cita bersama dilandasi keyakinan menemukan kesamaan diantara perbedaan yang ada. Dengan semboyan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika yang muncul sejak zaman kerajaan Majapahit kemudian kerajaan Sriwijaya dilanjutkan kerajaan-kerajaan Islam, kita meyakini perbedaan yang ada diwajibkan sebab bukan aspek aqidahnya (Sugiyarto, 2013)

Semangat kebhinekaan sangat penting dewasa ini mengingat muncul berbagai upaya destruktif yang melemahkan semangat kebangsaan di Indonesia. Perbedaan di kalangan umat Islam dijadikan alat efektif untuk membentuk sikap eksklusifisme dengan menganggap kelompok dan pandangannya yang paling benar. Hal ini memicu kontradiksi negatif di masyarakat sehingga seringkali menghasilkan konflik dan gesekan antar umat Islam yang tentunya kontraproduktif dalam mencapai cita-cita kebangsaan dan tujuan nasional Indonesia. Terkadang pula, perbedaan juga dijadikan sarana menciptakan pemahaman yang salah dalam toleransi antar umat beragama. Kalangan umat beragama non-Islam dibenci dengan alasan sentimen keagamaan dan dijadikan sasaran radikalisme-terorisme yang merugikan kepentingan umat Islam. Itu semua harus dikendalikan dan dikontrol melalui tindakan persuasif dengan mengokohkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dilandasi rasa kebangsaan yang tinggi, paham kebangsaan yang positif dan

semangat kebangsaan melalui kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan menumbuhkan jiwa patriotisme

Konteks belakangan ini, umat Islam dihadapkan dengan berbagai paham yang bertentangan dengan nilai Islam seperti liberalisme, komunisme, radikalisme dan terorisme. Semua itu bertentangan dengan akar budaya masyarakat Indonesia dan ajaran agama Islam yang ramah, damai dan terbiasakan menerima perbedaan yang ada. Dengan berbagai cara, paham asing yang belakangan massif bermunculan berusaha melemahkan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan kedudukan Islam sebagai agama yang menguatkan fondasi kebangsaan masyarakat Indonesia. Kita menghadapi sebuah kenyataan bagaimana kalangan liberalis, fundamentalis dan komunisme ingin mengganti konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah final. Padahal sejak Indonesia berdiri, para negawaran muslim dan sekuler telah beseapakat mengenai negara Indonesia dengan empat pilar kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara (MUI, 2022) Merujuk catatan historis, pilihan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari kesadaran pendiri bangsa terhadap luasnya wilayah Indonesia sehingga dibutuhkan konsep persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Negara kesatuan diartikan sebagai bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah (Irham, 2012)

Dalam menguatkan fondasi kebangsaan di atas, umat Islam di Indonesia mengakui eksistensi dan berlandaskan sikap, pola pikir dan tindakan berdasarkan konsitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam UUD 1945 diatur bagaimana hak dan kewajiban warga negara, perlindungan dari penguasa, tata hubungan dan tata kerja lembaga negara yang semua itu memungkinkan terciptanya suatu sistem kerja yang efektif, efisien dan produktif sesuai dengan tujuannya. Kebebasan beragama termasuk salah satu aturan yang ada dalam UUD 1945 yang memungkinkan umat Islam merasakan ketentraman dan kedamaian dalam menjalankan ibadah dan menghargai kebebasan beribadah umat lainnya selama tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Umat Islam bebas dan merdeka serta memiliki kesempatan yang sama dengan umat beragama lainnya dalam menjalankan ajaran agama tanpa harus takut mengalami ancaman, penindasan dan kekerasan. Ini disebabkan jaminan beragama diatur dan dilindungi oleh negara. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur kebebasan masyarakat untuk berbicara dan berpendapat, serta kesadaran kolektif warga negara untuk melindungi negara dari segala hal yang mengancam kedaulatan Indonesia, dimana semua itu dapat dimanfaatkan umat Islam dalam menunjukkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada bangsa dan negara.

Persoalan konstitusi, apalagi UUD 1945 memegang peranan strategis dan fundamental dalam hukum Indonesia yang menjadi panduan dalam mengatur warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara yuridis, UUD 1945 adalah fakta hukum sekaligus sejarah yang lahir dari perumusan kolektif dan kesepakatan demokratis para pendiri bangsa. Jika realitasnya terdapat kekurangan sebagai dampak dinamika perubahan zaman, maka UUD 1945 dapat mengalami perubahan agar mampu menyesuaikan dengan cita-cita berdemokrasi dan kepentingan bangsa Indonesia. Sejarah mencatat, setidaknya terdapat empat kali perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 dimana terjadi revisi atau perumusan

ulang terhadap beberapa aturan dan pasal yang dinilai sudah tidak kontekstual dengan perkembangan zaman. Ini menjadi tuntutan atas penyempurnaan produk manusia yang dijalankan secara konstitusional, arif, bijaksana dan mengutamakan nurani serta aspirasi masyarakat termasuk kalangan umat Islam. Berbagai perubahan itu juga menandakan betapa adaptif, representatif, aspiratif dan relevansinya UUD 1945 terhadap perubahan zaman. Konteks yang jarang mengalami perubahan justru berkaitan dengan agama khususnya Islam, yang mengatur bahwa Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agamanya, serta bebas beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing (Irham, 2012)

Salah satu lembaga yang aktif mengajak umat Islam untuk mencegah pemahaman umat Islam yang bertentangan dengan keIndonesiaan adalah Majelis Ulama Islam (MUI). Organisasi semi-pemerintah beranggotakan para ulama yang berasal dari berbagai organisasi keIslaman. Mereka berhimpun dalam sebuah organisasi keagamaan ini bertujuan memberikan saran, fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kebangsaan. Selain itu, MUI diharapkan mampu menjadi organisasi yang mampu mempromosikan persatuan antar umat Islam dan mampu menjadi mediator antara ulama sebagai wakil masyarakat dalam otoritas keagamaan dengan pemerintah sebagai wakil masyarakat dalam mengurus masalah kenegaraan. Dalam memberikan panduan kepada masyarakat, MUI menggunakan media sebagai alat legitimasi keputusannya yaitu fatwa dan wacana. Fatwa MUI memainkan peran penting dalam menumbuhkan gagasan dan pendapat sarana legitimasi MUI seperti Rekomendasi, Peringatan, Instruksi/Amanat, Pernyataan Sikap, Banding (Himbauan), dan Sumbangan Pemikiran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan analisis yang mengedepankan proses dan perspektif subjek. Landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan agar fokus penelitian selaras dengan fakta di lapangan (Cresswell, 2016) Peneliti melakukan kajian pustaka untuk menganalisis data sekunder dengan mengelaborasi bahan kepustakaan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literature yang berhubungan dengan subjek yang akan diteliti. Peneliti melakukan pengorganisasian data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari dan memutuskan apa yang menjadi temuan dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Polarisasi Pilpres 2019 dan Ketahanan Politik Indonesia

Pemilihan Presiden 2019 sejatinya berlangsung menarik karena mempertemukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang mewakili kalangan agamis dan nasionalis. Dalam berbagai perdebatan antar pasangan calon, terjadi perdebatan dan propaganda populis sebagai sebuah kewajaran yang mewarnai iklim Pilpres 2019. Isu masuknya pekerja asing, pengadaan alutsista dan anggaran militer, ancaman radikalisme dan gerakan separatisme, serta masuknya investasi asing menjadi perdebatan nasional.

Keduanya berusaha menarik simpati masyarakat agar mendukungnya sekaligus menyadarkan masyarakat terhadap ancaman kedaulatan negara dalam konteks ketahanan nasional khususnya ketahanan politik Indonesia baik dalam dan luar negeri. Politik menaikkan nilai nasionalisme ini penting dalam menghadapi multilateralisme dan interdependensi negara lain sekaligus mengukur sejauhmana kapabilitas negara dalam mengatasi ancaman yang ada. Paska perdebatan di panggung politik nasional yang disiarkan berbagai media massa cetak dan elektronik, perdebatan berpindah ke ruang maya yang didukung keriuhan masing-masing pendukung calon presiden (Ramdhan, 2019)

Berdasarkan hasil perhitungan akhir Komisi Pemilihan Umum, Jokowi-Ma'ruf dinyatakan sebagai pemenang. Dengan hasil ini, keduanya berhak memimpin Indonesia secara legal-konstitusional selama periode 2019-2024. Adanya hasil ini tentu mengundang kegembiraan di pihak yang menang dan kekecewaan pada mereka yang kalah dalam kontestasi politik. Secara nalar logika, terlepas dari hasil yang ada, selayaknya kita menerima dengan bijaksana proses demokrasi yang sudah berlangsung. Kebijakan dan kedewasaan berpolitik kita layak mendapatkan pujian ketika mampu melalui ujian berdemokrasi melalui sarana legal-formal pemilihan umum yang berlangsung ketat, panas dan menguras emosi pada pendukung kedua pasangan calon ini. Ketahanan politik kita juga mendapatkan ruang yang tepat ketika kita mau menerima kekalahan dan mengakui kelompok yang menang. Tentu ada perdebatan dan perbedaan pandangan sangat tajam ketika kompetisi pemilu berjalan, tetapi selesai berkompetisi kita harus kembali berdamai dan meneruskan secara bersama-sama perjalanan politik bangsa Indonesia di masa mendatang.

Tetapi realitasnya paska pilpres 2019, polarisasi politik belum selesai khususnya yang terjadi di media sosial. Pendukung kedua belah pihak masih sibuk dalam perdebatan panjang dan saling menyematkan label negatif kepada pihak yang memiliki pandangan politik berseberangan. Mereka yang pro kepada Prabowo-Sandi memberikan stigma kecebonng kepada pendukung Jokowi-Ma'ruf yang dibalas dengan sebutan kadrung (kadal gurun-pen) kepada lawan politiknya. Hal ini dibarengi dengan peredaran hoaks, sentiment negatif dan berita miring kepada lawan politiknya yang terkadang membuat kegaduhan di media sosial. Tanpa membaca konten berita dan melihat dari judulnya saja akibat lemahnya tingkat literasi masyarakat, mereka mudah menyebarkan secara sporadis berbagai berita yang belum teruji kelayakan dan kevalidannya. Kelompok pendukung fanatic dari pihak yang kalah dan menang terlibat keributan media sosial dilandasi semangat egosentrisme tinggi, merasa kelompoknya paling benar dan kelompok yang lain salah. Seketika, bangsa Indonesia terjebak dalam polarisasi politik berkepanjangan yang melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Ketegangan politik paska Pilpres 2019 itu sejatinya terjadi akibat emosionalitas publik yang didorong gencar dan massifnya serangan politik terhadap lawan politik yang dilakukan dengan liar di media sosial. Hal ini terjadi karena adanya tentara siber yang dibentuk relawan dan konsultan politik kedua pasangan sebagai strategi memenangkan pertarungan politik. Kondisi ini berlangsung secara massif sehingga berdampak kepada kekacauan sosial, pembelahan sosial dan konflik antar kelompok di masyarakat. Kekacauan sosial terlihat di media sosial

dimana relawan dan pendukung kedua pasangan calon presiden saling melemparkan konten dan kritik yang cenderung liar dan tidak mampu dikontrol negara. Ini diperburuk adanya unsur pembiaran dan cenderung memperparah kondisi yang ada dengan menjadikan isu SARA dalam kampanye hitam dan negatif kepada lawan politiknya. Keberpihakan yang cenderung melibatkan emosionalitas secara subyektif sebagai akibat adanya dua pasang capres yang saling berhadapan memperburuk kondisi yang ada dan melahirkan pembelahan sosial dan polarisasi politik yang berkepanjangan. Manipulasi pemberitaan, peredaran hoaks dan ujaran kebencian yang vulgar yang disebarkan tanpa sumber yang jelas di media sosial membuat kontestasi politik pilpres 2019 cenderung menakutkan dan mengganggu ketahanan politik serta stabilitas keamanan dalam negeri di Indonesia (Badrun, 2018)

Kontestasi politik dengan memanfaatkan media digital memang berdampak luas sehingga melahirkan pembelahan masyarakat akibat belum selesainya konflik paska pilpres 2019, menghadirkan ketegangan berpolitik di pemerintahan dan memicu konflik sosial di masyarakat sebagai akibat kapitalisasi politik yang dipicu kekalahan dan kemenangan calon yang diusung dalam Pilpres 2019. Apalagi konflik yang ada diwarnai pemunculan agama dalam hal ini kelompok Islam yang dicitrakan kepada pasangan Prabowo-Sandi. Sementara Jokowi-Ma'ruf dicitrakan sebagai lawan politik dari kelompok abangan yang nasionalis-sekuler. Padahal latar belakang Ma'ruf Amin berasal dari kalangan Islam tradisional dan pernah menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tetapi ketegangan diwarnai konflik yang membenturkan Islam dan kalangan sekuler terlanjur muncul dan mempengaruhi emosionalitas kedua pendukung sehingga terbentuk citra yang melekat dan terus muncul dalam menyebut cebong dan kadrin terhadap lawan politiknya masing-masing.

Dalam mengatasi kondisi itu, jelas dibutuhkan ketahanan politik yang kuat dari segenap elemen bangsa Indonesia. Ketahanan nasional di bidang politik adalah kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT dari dalam maupun dari luar, yang langsung atau tidak langsung membahayakan kehidupan politik bangsa dan negara (Winarno dan Haryati, 2005) Agar tercipta kondisi Ketahanan Nasional Indonesia yang kuat, maka perlu diciptakannya sistem politik yang kondusif bagi terciptanya kondisi tersebut berdasarkan Pancasila. Ketahanan Nasional Indonesia di bidang politik menghadapi ancaman yang bersumber dari dalam negeri, yaitu berupa kegiatan subversi untuk merongrong ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, dan kegiatan politik praktis kelompok-kelompok non formal yang secara langsung atau tidak langsung menghalang-halangi upaya perwujudan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari luar negeri, berupa kegiatan subversi asing yang merugikan kepentingan Indonesia maupun negara-negara ASEAN (Arief, 2010).

B. Komitmen Kebangsaan MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi tempat berhimpun perwakilan ulama dan cendekiawan muslim yang bertujuan menjembatani persoalan keumatan

yang melibatkan umat Islam dan Pemerintah Indonesia (Maftuh, 2017). Dalam perspektif sosiologis, Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah institusi sosial, yang terkategori sebagai sebuah organisasi sosial yang tidak lebih sebagai kumpulan orang-orang terpisah yang berkumpul pada satu tempat dengan berbagai kepentingan yang ada (Plas, 2012) Sebagai organisasi yang mewadahi ulama dan tokoh keagamaan Islam, MUI dipandang sebagai penengah yang sejatinya mampu mengambil peran aktif dalam dinamika kebangsaan dan situasi politik nasional di masyarakat. Otoritas keagamaan MUI melalui berbagai keputusan resmi yang dikeluarkannya akan cenderung didengar dan ditaati masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia.

Melihat kondisi itu, maka MU berusaha ikut aktif mengambil bagian dalam mengatasi ketidakstabilan politik nasional, keretakan bangsa akibat pembelahan politik dan sikap saling curiga antar elemen bangsa karena hilangnya sikap saling percaya di antara sesama anak bangsa. Sebagai organisasi yang dipercaya umat Islam, komitmen kebangsaan MUI dalam menguatkan ketahanan politik Indonesia tercermin dalam sikap yang ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional II MUI pada Jum'at, 25 November 2016 sebagai berikut.

Pertama, MUI menegaskan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan ulama dan umat Islam Indonesia. Komitmen kebangsaan ini membuat MUI memandang wawasan kebangsaan dalam Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika bersifat final dan mengikat.

Kedua, Umat Islam di Indonesia memiliki kewajiban menjaga dan memelihara keutuhan NKRI dan kebersamaan antar elemen bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan baik dari dalam dan luar negeri.

Ketiga, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bersifat mengikat seluruh elemen kebangsaan dilandai semangat dan tanggung jawab keagamaan (mas'uliyah diniyyah) dan tanggung jawab kebangsaan (mas'uliyah wathaniyyah) yang bertujuan untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama (hirasat ad din wa siyasat ad dunya).

Keempat, setiap elemen bangsa harus hidup berdampingan dengan prinsip kesepakatan (mu'ahadah atau muwatsaqah), bukan posisi saling memerangi (muqatalah atau muharabah).

Kelima, Kepada seluruh penyelenggara negara, MUI mengingatkan Indonesia dibentuk pendiri bangsa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan yang luhur tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Untuk itu MUI meminta pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat kecil (mustadh'afin), sehingga tidak terus terjadi kesenjangan dan ketidakadilan yang semakin melebar (Detik.com, 2022)

Komitmen kebangsaan MUI ini meski dikeluarkan pada tahun 2016 dalam menghadapi dinamika konflik paska pemilu 2014, realitasnya masih relevan dalam menjawab tantangan politik paska pemilu 2019. Terlihat sekali bagaimana MUI menginginkan polarisasi politik tidak perlu terjadi, sebab komitmen rakyat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya kepada wawasan kebangsaan

bersifat final. Adanya stigma dan penyebutan kepada kelompok lain di media sosial dengan istilah yang bernada negatif harus dihindarkan karena mengganggu stabilitas politik dan persatuan bangsa Indonesia. Bagaimanapun kondisi pembelahan politik di masyarakat harus dipahami sebagai ancaman bagi keberlangsungan Indonesia di masa mendatang. Maka eskalasi konflik harus dikontrol dengan mengedepankan semangat kebersamaan sebagai warga negara yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi secara normatif, konflik sosial paska Pilpres 2019 sangat bertentangan dengan Pancasila baik segi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah-mufakat dan keadilan sosial.

Kesimpulan dan Saran

Merujuk kepada komitmen kebangsaan MUI di atas, kita juga dapat melihat bagaimana ketegangan politik di media sosial akibat ketidakdewasaan berpolitik harus segera diakhiri. Sesama anak bangsa dan umat beragama khususnya Islam tidak mengajarkan dendam berkepanjangan dan menekankan hidup keharmonian. Kita harus mengedepankan prinsip kedamaian, bukan terjebak pada posisi saling memerangi sesama anak bangsa Indonesia. Kita harus kembali mengingat bagaimana tujuan dan kepentingan nasional bangsa Indonesia di atas kepentingan politik dan kelompok yang bersifat pragmatis dan insidental. Sekali lagi, adanya komitmen kebangsaan MUI menegaskan sikap MUI selalu menemukan relevansinya dalam berbagai ruang dan waktu, serta mampu berfikir secara jauh bahwa kepentingan bangsa Indonesia dengan tetap melindungi aspirasi umat Islam harus diutamakan dan didahulukan di atas berbagai kepentingan baik pribadi dan kelompok.

Dengan adanya sikap dan komitmen kebangsaan ini, kita tentu berharap pihak yang bertikai mau dan mampu menemukan titik kesepakatan sehingga tercapai konsensus yang mampu menghentikan dinamika dan konflik ini agar tidak semakin berkepanjangan dan mengganggu keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di masa mendatang, kita berharap MUI sebagai sarana berkumpul ulama akan terus aktif memberikan kontribusi penting dalam menjawab persoalan sosial-politik yang penuh kompleksitas. Bagaimanapun, MUI akan selalu dipercaya sebagai penghubung pemerintah dan umat Islam di Indonesia yang mengedepankan Islam yang moderat, harmoni dan selalu mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan persoalan umat di tengah perubahan zaman yang cepat dan dinamika sosial-politik yang membutuhkan solusi terbaik baik secara keagamaan dan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku/Jurnal**

Cresswell, J., W, (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daniel, L. P, (2012). *Seven Theories of Religion*, Penerj. Inyiah Ridwan Munir. Yogyakarta : IRCiSoD.

Hasan, M. (2017). Aktivitas MUI Dalam Perkembangan Kehidupan Keagamaan Di Surakarta Tahun 1975-2015. *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, 2(1), h. 141-160

Irham, M., A, (2012). Pengamanan Pilar Bangsa dan Masa Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 6(1), h. 125 – 149

Ramadhan, M., A, (2019). Politik Ketahanan Nasional: Komparasi Dalam Referendum Brexit 2016 dan Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Dinamika Global*. 4(2), h. 347-363

Badrun, U. (2018). Ketahanan Nasional Indonesia di Bidang Politik Di Era Demokrasi Digital (Tantangan Tahun Politik 2018-2019 dan Antisipasinya). *Jurnal Lemhanas*. Edisi 33, h.21-36

Arief, U. (2010). Menciptakan Sistem Politik Berdasarkan Pancasila Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional. *Jurnal Sosial Humaniora*. 3(2), h. 139-147.

Sugiyarto, W. (2013). Al Wahdah Al Islamiyah : Radikalisme dan Komitmen Kebangsaan. *Jurnal Harmoni*, Januari-April 2013, h. 86 – 100

Winarno dan Haryati, S., (2005). *Pendidikan Pancasila UPT MKU UNS*. Surakarta : Pustaka Cakra.

Internet

Majelis Ulama Indonesia. *KH Maruf Amin : Tugas MUI Memperkuat Komitmen Kebangsaan*, <https://mui.or.id/berita/10618/kh-maruf-amim-tugas-mui-memperkuat-komitmen-kebangsaan/> Diakses 13 Juli 2022.

Batubara, Herianto. *Ini Isi Komitmen Kebangsaan dan Kenegaraan Majelis Ulama Indonesia*, <https://news.detik.com/berita/d-3354499/ini-isi-komitmen-kebangsaan-dan-kenegaraan-majelis-ulama-indonesia>. Diakses 13 Juli 2022